

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya diperoleh beberapa kesimpulan sebagaimana berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan belum dilaksanakan sepenuhnya. Dengan kata lain, masih terdapat banyak kekurangan dalam implementasi Perda tersebut. Berikut uraian mengenai implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan berdasarkan kerangka teori Edward III.
 - a. Faktor komunikasi sudah berjalan dengan baik. Transmisi informasi telah berjalan dengan baik antara pemerintah selaku pembuat kebijakan, dengan pihak perusahaan dan petani. Begitu pula halnya dengan kejelasan informasi yang diberikan mengenai pola kemitraan.
 - b. Faktor sumberdaya masih memiliki keterbatasan dalam hal jumlah dan kualifikasi staff, keterbatasan informasi, dan kurangnya kejelasan wewenang bagi pihak petani untuk melakukan pengawasan di lapangan.
 - c. Faktor disposisi masih memiliki kekurangan. Sikap staf yang bertugas masih belum profesional dan tidak ada insentif bagi staf.
 - d. Faktor struktur birokrasi dapat dikatakan cukup. Kekurangan dalam faktor struktur birokrasi adalah pada SOP. SOP masih sebatas dalam hal

penerimaan anggota, namun belum ada SOP yang jelas mengenai pelaksanaan kemitraan. Dalam hal fragmentasi dapat dikatakan cukup baik karena telah ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang menjadi wewenang Dinas Pertanian.

2. Faktor-faktor yang mendukung (*supplementary factors*) dan yang menghambat (*resistor factors*) keberhasilan implementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan diuraikan sebagaimana berikut.
 - a. Faktor-faktor yang mendukung (*supplementary factors*) adalah;
 - 1) Perusahaan memiliki kesiapan yang cukup baik untuk melaksanakan kemitraan
 - 2) Komunikasi antara pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan dengan perusahaan dan petani sudah cukup baik, dalam hal transisi maupun kejelasan komunikasi
 - 3) Sudah ada kejelasan mengenai tugas dan kewenangan perusahaan dalam pola kemitraan yang harus dijalankan
 - b. Faktor-faktor yang menghambat (*resistor factors*) adalah;
 - 1) Masih ada perusahaan yang belum menjalankan Perda Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan
 - 2) Belum adanya kejelasan mengenai batas desa dari pihak pemerintah daerah

- 3) Adanya peraturan dari masyarakat lokal yang menetapkan *fee* kayu dalam jumlah yang sangat besar sehingga memberatkan perusahaan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil-hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui Dinas Pertanian dalam hal pengaturan implementasi Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung program kemitraan pembangunan pertanian. Pemerintah juga dapat melakukan dukungan dengan menetapkan batas desa yang lebih jelas sehingga program kemitraan tidak memperoleh kendala dari hal tersebut.
2. Bagi pihak perusahaan perkebunan sawit yang terdapat di Kabupaten Bulungan diharapkan dapat bekerja sama dan bersedia melaksanakan Perda Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan. Hal ini disebabkan kebijakan tersebut merupakan solusi yang baik dan menguntungkan kedua belah piha, yaitu pihak perusahaan, dan pihak petani
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap pelaksanaan penelitian ini. Pengembangan penelitian perlu dilakukan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik dan lebih bermakna. Pengembangan terhadap pelaksanaan penelitian ini dapat dilakukan dengan

memperluas wilayah penelitian seperti halnya dengan melakukan perbandingan antara pola kemitraan pembangunan pertanian pada suatu daerah dengan pola kemitraan pembangunan pertanian di daerah yang lain.